

**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PANGKALPINANG**

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2020**

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020



**Komplek Perkantoran PemProv Kep. Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Pangkalpinang**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalpinang, Februari 2021
Kepala Balai POM di Pangkalpinang



Hermanto, S. Si., Apt., MPPM

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Lampiran	vi
Pernyataan Tanggung Jawab	vii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	29
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	41
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	46
F. Pengungkapan Penting Lainnya	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kriteria Kualitas Piutang.....	12
Tabel 2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	17
Tabel 3. Capaian Output Tahun 2020	19
Tabel 4. Rincian Anggaran Tahun 2020	21
Tabel 5. Rincian Anggaran Berdasar Program	21
Tabel 6. Perubahan Anggaran dan Program	22
Tabel 7. Uraian Pendapatan Per 31 Desember 2020.....	22
Tabel 8. Rincian Estimasi pendapatan dan realisasi PNBPN Per 31 Desember 2020.....	23
Tabel 9. Perbandingan Realisasi pendapatan per 31 Desember 2020 dan 2019	23
Tabel 10. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020	24
Tabel 11. Rincian Belanja Berdasarkan Program 31 Desember 2020	25
Tabel 12. Perbandingan realisasi belanja per 30 Des 2020 dan 2019	25
Tabel 13. Rincian Realisasi Belanja Pegawai per 31 Des 2020 dan 2019	26
Tabel 14. Rincian Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 2019	26
Tabel 15. Rincian Anggaran dan Realisasi Akun Covid-19	27
Tabel 16. Rincian Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2020 dan 2019	28
Tabel 17. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Des 2020 dan 2019	28
Tabel 18. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019.....	29
Tabel 19. Transfer Masuk Tahun 2020.....	29
Tabel 20. Persediaan dalam Kondisi Usang Per 31 Desember 2020	29
Tabel 21. Stock Opname Belanja Barang Akun 521211 Per 31 Des 2020	30

DAFTAR TABEL

Tabel 22. Mutasi Aset Tanah	31
Tabel 23. Rincian Tanah per 31 Desember 2020.....	31
Tabel 24. Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020	31
Tabel 25. Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Des 2020	35
Tabel 26. Rincian Jalan, Irigasi & Jaringan per 31 Desember 2020.....	36
Tabel 27. Nilai Wajar Hasil Inventaris dan Penilaian Kembali	37
Tabel 28. Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020	37
Tabel 29. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020.....	38
Tabel 30. Rincian Mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2020.....	38
Tabel 31. Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020	39
Tabel 32. Uraian Utang Kepada Pihak Ketiga.....	38
Tabel 33. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Des 2020 dan 2019	41
Tabel 34. Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2020 dan 2019	41
Tabel 35. Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2020 dan 2019	42
Tabel 36. Rincian Beban Jasa Per 31 Desember 2020 dan 2019	42
Tabel 37. Rincian Beban Akun Covid-19	42
Tabel 38. Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2020 dan 2019	43
Tabel 39. Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2020 dan 2019.....	43
Tabel 40. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Des 2020 dan 2019	44
Tabel 41. Rincian Surplus dari Keg Non Operasional per 31 Des 2020 dan 2019.....	44
Tabel 42. Rincian Pendapatan per 31 Desember 2020	44
Tabel 43. Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2020	46

DAFTAR TABEL

Tabel 44. Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2020	47
Tabel 45. Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2020	47
Tabel 46. Uraian barang bukti per 31 Desember 2020	48
Tabel 47. Peminjaman Alat terkait Covid 19.....	49
Tabel 48. Uraian barang bukti per 31 Desember 2020	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Hasil Perbaikan Penilaian Kembali BMN per 31 Des 2020	52
Lampiran II. Beban Amortisasi per 31 Des 2020	53
Lampiran III. Jurnal AkruaI 2020	54

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun 2020 Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang selaku satker dan juga bertindak sebagai wilayah di Provinsi Bangka Belitung yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, Februari 2021

Kepala Balai POM di Pangkalpinang



Hermanto, S.Si., Apt., MPPM

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah- kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020. **Realisasi Pendapatan Negara** pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada per 31 Desember 2020 berupa pendapatan negara bukan pajak senilai **Rp17.016.402,00**. **Realisasi Belanja Negara** Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang per 31 Desember 2020 senilai **Rp14.539,868.067,00** atau **92,14% (netto)** dari anggaran senilai **Rp15.779.716.000,00**

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2020. Nilai **Aset per 31 Desember 2020** dicatat dan disajikan senilai **Rp23.191.457.178,00** yang terdiri dari **Aset Lancar** senilai **Rp2.139.065.246,00**. **Aset Tetap** senilai **Rp21.052.391.932,00**. Nilai **Kewajiban dan Ekuitas** masing-masing senilai **Rp90.248.239,00** dan **Rp23.101.208.939,00**

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah senilai **Rp2.565.400,00** sedangkan jumlah beban operasional senilai **Rp17.087.811.090,00** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp17.085.245.690,00** Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing senilai **Rp8.107.738,00** dan **Rp0**. sehingga entitas mengalami Defisit- LO senilai **Rp17.093.353.428,00**

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah senilai **Rp25.685.381.349,00** ditambah Defisit-LO senilai **Rp17.093.353.428,00** kemudian ditambah

dengan koreksi-koreksi senilai **Rp95.659.123,00** dan transaksi antar entitas senilai **Rp14.604.840.141,00** sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai **Rp23.101.208.939,00**

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PERIODE 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 Desember TA 2020		% thd Angg	31 Desember TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	17.016.402	0	67.552.801
JUMLAH PENDAPATAN		0	17.016.402	0	67.552.801
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasional					
Belanja Pegawai	B.3	8.074.036.000	7.247.169.618	89,76	7.369.918.796
Belanja Barang	B.4	7.631.405.000	7.223.383.949	94,65	11.484.438.479
Belanja Modal	B.5	74.275.000	69.314.500	93,32	3.098.713.300
JUMLAH BELANJA		15.779.716.000	14.539.868.067	92,14	21.953.070.575

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(dalam rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
ASET LANCAR			
Persediaan	C.1	2.139.065.246	1.479.487.310
JUMLAH ASET LANCAR		2.139.065.246	1.479.487.310
ASET TETAP			
Tanah	C.2	3.202.708.111	3.202.708.111
Peralatan dan Mesin	C.3	48.160.525.055	47.972.143.117
Gedung dan Bangunan	C.4	7.606.202.750	7.325.908.750
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.5	132.668.710	194.832.710
Aset Tetap Lainnya	C.6	46.818.500	46.818.500
Akumulasi Penyusutan	C.7	(38.096.531.194)	(34.534.934.433)
JUMLAH ASET TETAP		21.052.391.932	24.207.476.755
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain	C.8	355.469.588	1.165.109,691
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.9	(355.469.588)	(1.122.336.621)
JUMLAH ASET LAINNYA		0	42.773.070
JUMLAH ASET		23.191.457.178	25.729.737.135
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.10	90.248.239	44.355.786
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		90.248.239	44.355.786
JUMLAH KEWAJIBAN		90.248.239	44.355.786
JUMLAH EKUITAS	C.11	23.101.208.939	25.685.381.349
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		23.191.457.178	25.729.737.135

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Des 2020	31 Des 2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	2.565.400	16.481.084
JUMLAH PENDAPATAN		2.565.400	16.481.084
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	7.286.966.919	7.373.183.912
Beban Persediaan	D.3	676.481.547	1.281.632.447
Beban Barang dan Jasa	D.4	4.097.281.152	4.672.570.371
Beban Pemeliharaan	D.5	610.885.094	1.663.045.812
Beban Perjalanan	D.6	1.278.184.711	3.807.011.856
Beban Penyusutan Amortisasi	D.7	3.138.971.667	4.759.543.833
JUMLAH BEBAN		17.087.811.090	23.556.988.231
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(17.085.245.690)	(23.540.507.147)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(26.501.604)	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		68.048.581	165.766.861
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		49.654.715	23.354.801
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D8	(8.107.738)	142.412.060
SURPLUS/DEFISIT LO		(17.093.353.428)	(23.398.095.087)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019
EKUITAS AWAL	E.1	25.685.381.349	26.098.668.324
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(17.093.353.428)	(23.398.095.087)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(95.659.123)	(1.674.028)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI PERSEDIAAN/ASET TETAP/ASET LAINNYA	E.3.1	(25.551.734)	0
REVALUASI ASET TETAP	E.3.2	2.415.846.280	0
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.3	(2.485.953.669)	(1.674.028)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	14.604.840.141	22.986.482.140
DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	E.4.1	14.539.868.067	21.953.070.575
DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	E.4.2	(17.016.402)	(67.552.801)
TRANSFER MASUK	E.4.3	81.988.476	1.100.964.366
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS		(2.584.172.410)	(413.286.975)
EKUITAS AKHIR	E.5	23.101.208.939	25.685.381.349

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar Hukum
dan Rencana
Strategis*

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai:

Pasal 33

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPOM dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis.

Pasal 34

Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana: dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Pasal 144 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan **Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.**

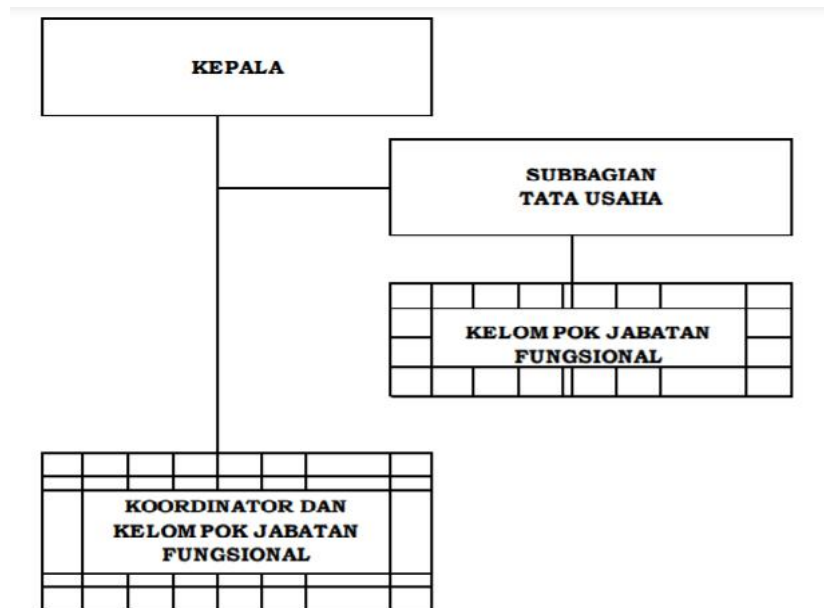
Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan; f. pelaksanaan pemantauan label dan

- iklan Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
 - g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
 - h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
 - i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
 - k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang



Renstra Balai POM di Pangkalpinang memuat visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi POM di Pangkalpinang untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan program prioritas Presiden.

Visi Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2019-2024

Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, yaitu:

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Misi Balai POM di Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai POM di Pangkalpinang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Badan POM.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. BASIS AKUNTANSI

Balai POM di Pangkalpinang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk

penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai POM di Pangkalpinang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat senilai pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau senilai nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat senilai nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai POM di Pangkalpinang. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang sesuai Perka Badan POM no 12 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-

LRA

1. PENDAPATAN-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN.
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

*Pendapatan-
LO*

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. PENDAPATAN-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

Belanja

3. BELANJA

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan program akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. BEBAN

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadi konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. ASET

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh:
 - a. Barang Habis Pakai seperti Alat Tulis Kantor, Barang Cetak (leaflet, brosur dll), Reagensia, Suku Cadang, Baku Pembanding, Hewan Percobaan;
 - b. Barang Tak Habis Pakai seperti Alat Gelas (Glassware); dan
 - c. Barang Bekas Pakai seperti komponen bekas.
2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, contoh : bahan baku untuk pembuatan baku pembanding.
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintah, untuk dijual atau untuk diserahkan kepada masyarakat, contoh : baku pembanding yang masih dalam proses produksi. Yang dimaksud dengan barang dalam proses produksi adalah barang yang masih dalam proses pengujian sampai proses pengemasan.
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Sesuai dengan Perka Badan POM No. 12 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dikecualikan sebagai Persediaan berupa Arsip Sampel di Lingkungan Badan POM karena merupakan item yang diperoleh atau dibeli dalam satu rangkaian pengujian suatu produk yang sebagian item disimpan untuk keperluan dokumentasi (retain sample). Oleh karena Arsip Sampel tersebut bukan merupakan barang atau perlengkapan yang memiliki nilai ekonomis untuk digunakan/dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional entitas atau untuk dijual/diserahkan ke masyarakat, maka Arsip Sampel tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai Persediaan dan dicatat sebagai Beban pada saat perolehannya. Namun untuk menjaga tata kelola yang baik, maka Arsip Sampel agar dibukukan ulang dalam catatan manual sebagai bentuk pertanggungjawaban secara manajerial.

Persediaan disajikan senilai:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - a. Harga pembelian
 - b. Biaya pengangkutan
 - c. Biaya penanganan

- d. Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan termasuk pajak.
2. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:
 - a. Potongan harga
 - b. Rabat dan lainnya yang serupa
 - c. Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga Pokok Produksi (HPP) terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan secara sistematis.
3. Nilai Wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lain seperti donasi yang tidak diperoleh harga perolehannya. Nilai wajar yang dimaksud dapat menggunakan harga pasar atau estimasi yang ditentukan oleh Badan POM, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah no.05 Akuntansi Persediaan.
 - Persediaan alat gelas laboratorium adalah peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca, plastik atau bahan lainnya yang digunakan untuk keperluan laboratorium. Alat gelas yang diakui sebagai persediaan meliputi:
 1. Alat gelas berupa alat ukur kuantitatif diantaranya:
 - a. alat gelas yang masih ada di gudang
 - b. alat gelas di laboratorium yang belum digunakan
 - c. alat gelas di laboratorium yang sudah digunakan dan masih dalam keadaan baik.
 2. Alat gelas berupa alat ukur kualitatif diantaranya terlampir
 - a. alat gelas yang masih ada di gudang,
 - b. alat gelas di laboratorium yang belum digunakan
 - Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - i. Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian
 - ii. Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - iii. Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari (1) satu tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:
 - a. Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah).
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Penilaian kembali merupakan proses revaluasi sesuai standar akuntansi pemerintah yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian. Pelaksanaan penilaian kembali aset tetap dilaksanakan berdasarkan:
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - b) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
 - c) PMK Nomor 57/PMK.06/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
 - d) PMK Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
- Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan irigasi berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan

31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup obyek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan survei lapangan untuk obyek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk obyek penilaian kembali selain tanah.

Sehubungan dengan pemeriksaan BPK RI terhadap pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018, BPK RI merekomendasikan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang untuk memperbaiki data hasil inventarisasi dan tindak lanjut hasil penilaian kembali BMN. Selanjutnya, berdasarkan surat Anggota II BPK RI Nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 06 Januari 2020 perihal tanggapan atas penyelesaian tindak lanjut perbaikan penilaian kembali BMN Tahun 2017-2018 disampaikan bahwa perbaikan penilaian kembali BMN telah dilakukan secara signifikan dan hasilnya direviu oleh APIP. Pada tahun 2019-2020, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/ koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 07 Akuntansi Aset Tetap Paragraf 78.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - i. Tanah
 - ii. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
 - iii. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud disajikan senilai nilai tercatat neto yaitu senilai harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor :81/KM.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Di Badan POM Amortisasi yang ada yaitu Software Komputer dengan masa manfaat selama 4 tahun.
- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan senilai harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang, Belanja Yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan

untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat senilai nilai nominal, yaitu senilai nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 09 Akuntansi Kewajiban.

Ekuitas

7. EKUITAS

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Capaian

A.6. CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS

Selama periode Tahun Anggaran 2020, output strategis yang telah dicapai oleh Balai POM di Pangkalpinang sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian Output Tahun 2020

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
1	3165.003	Sampel Makanan yang Diperiksa (Output Strategis)	160.828.000	153.943,469	95.72	227	231.00	100.00
2	3165.004	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	32,150,000	28,379,600	88.27	41	48.00	100.00
3	3165.005	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	376,815,000	359,599,832	95.43	402	483.00	100.00
4	3165.011	Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan	16,652,000	16,612,902	99.77	4	4.00	100.00
5	3165.012	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1,272,658,000	1,210,971,345	95.15	1	1.00	100.00
6	3165.041	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Bangka Belitung	319,075,000	163,166,400	51.14	4	2.00	50.00
7	3165.081	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa (Output Strategis)	321,698,000	310,864,826	96.63	631	632.00	100.00
8	3165.083	Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan	177,176,000	173,148,237	97.73	1	1.00	100.00

Laporan Keuangan Tahun 2020 Balai POM di Pangkalpinang

9	3165.085	Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) (Output Strategis)	207,236,000	207,124,550	99.95	12	12.00	100.00
10	3165.087	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan (Output Strategis)	37,220,000	18,050,000	48.50	5	5.00	100.00
11	3165.088	KIE Obat dan Makanan Aman	665,864,000	664,033,481	99.73	38	44.00	100.00
12	3165.089	Desa Pangan Aman (Output Strategis)	559,070,000	558,391,760	99.88	5	5.00	100.00
13	3165.090	Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (Output Strategis)	104,085,000	103,830,150	99.76	1	1.00	100.00
14	3165.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	74,275,000	69,314,500	93.32	1	1.00	100.00
15	3165.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	799,639,000	789,837,720	98.77	1	1.00	100.00
16	3165.994	Layanan Perkantoran	10,655,275,000	9,728,381,009	91.30	1	1.00	100.00

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai POM di Pangkalpinang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Terdapat 5 (lima) revisi yang dilakukan sampai 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan revisi berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Revisi anggaran tersebut antara lain pengurangan pagu belanja modal senilai Rp.1.788.725.000,00 pada anggaran belanja modal peralatan dan mesin berupa pengadaan alat laboratorium. Untuk pagu belanja barang berkurang senilai Rp3.263.526.000,00 yang diambil dari belanja perjalanan, belanja jasa, belanja pemeliharaan serta belanja bahan.

Tabel 4. Rincian Anggaran Tahun 2020

Uraian	TAHUN 2020	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	8.074.036.000	8.074.036.000
Belanja Barang	10.894.931.000	7.631.405.000
Belanja Modal	1.863.000.000	74.275.000
Jumlah Belanja	20.831.967.000	15.779.716.000

Sedangkan jika dilihat berdasarkan program maka perubahannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Anggaran Berdasar Program

KODE	PROGRAM	TAHUN 2020	
		ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
06	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 20.831.967.000	Rp 15.779.716.000
		20.831.967.000	15.779.716.000

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan Anggaran dan Program maka perubahannya adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Perubahan Anggaran dan Program

PROGRAM		06 Program Pengawasan Obat dan Makanan	Total
Belanja Pegawai (51)	Anggaran Awal	8.074.036.000,00	8.074.036.000,00
	Anggaran Setelah Direvisi	8.074.036.000,00	8.074.036.000,00
Belanja Barang (52)	Anggaran Awal	10.894.931.000,00	10.894.931.000,00
	Anggaran Setelah Direvisi	7.631.405.000,00	7.631.405.000,00
Belanja Modal (53)	Anggaran Awal	1.863.000.000,00	1.863.000.000,00
	Anggaran Setelah Direvisi	74.275.000,00	74.275.000,00
Total	Anggaran Awal	20.831.967.000,00	20.831.967.000,00
	Anggaran Setelah Direvisi	15.779.716.000,00	15.779.716.000,00

Realisasi
Pendapatan
Rp17.016.402,00

B.1 PENDAPATAN

Pendapatan dari penerimaan negara bukan pajak Balai POM di Pangkalpinang per 31 Desember 2020 senilai Rp17.016.402,00

Tabel 7. Uraian Pendapatan Per 31 Desember 2020

NO.	URAIAN	TGL	AKUN	JUMLAH
1	Kelebihan Perjadin Patok Banding RB ke BBPOM di Surabaya a.n Tri Astuti dkk (7 org)	18-20 Des 2019	425912	Rp 269.434
2	Kelebihan Perjadin Pelatihan Auditor Internal ISO 9001:2015 di Yogyakarta a.n Burhan	9-13 Des 2019	425912	Rp 59.249
3	Kelebihan Perjadin Inventarisasi BMN di Loka Belitung a.n Ade Yan Emerson dan Anita	9-11 Des 2019	425912	Rp 1.151.802
4	Kelebihan Perjadin Pelatihan Eksternal Pengujian di BMD Training dan Cosulting di Bogor a.n Gita	10-13 Des 2019	425912	Rp 840.227
5	Kelebihan Perjadin Bimtek Studi Tiru Pemdak dan RB di BBPOM di Denpasar a.n Frans E.A dkk	19-21 Des 2019	425912	Rp 150.200
6	Kelebihan Perjadin Monev RB di Badan POM a.n Rachmadiniarni dkk (3 org)	18-20 Des 2019	425912	Rp 1.477.905
7	Kelebihan Tunjangan Kinerja bulan Des 2019	-	425912	Rp 2.369.337
8.	Kelebihan uang makan bulan Desember 2019	-	425912	Rp 788.500

9	Pembulatan pembayaran kekurangan gaji TAYL bulan Sept-Nov 2019 sebanyak 3 pegawai 5 Jiwa a.n Prawita dkk	-	425911	Rp	90
10	Pembulatan pembayaran kekurangan gaji TAYL bulan Jan-Nov 2019 sebanyak 1 pegawai 3 Jiwa a.n Welinda Syafri	-	425911	Rp	759
11	Denda Keterlambatan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional Loka Belitung	-	425811	Rp	2.100.000
12	Pengembalian kelebihan gaji okt-des 2019 a.n Riantika Kurniati	-	425911	Rp	343.500
13	Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintan Pengadaan Operasional Pendukung Pengujian CV. Cahaya Gemilang Abadi		425811	Rp.	102.400
14	Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintan Pengadaan Suku Cadang CV. Nugarada Abadi		425811	Rp.	363.000
15	proses lelang BMN peralatan dan mesin kondisi rusak berat pada Balai POM di Pangkalpinang sejumlah 159 unit		425129	Rp.	6.999.999
		Total		Rp	17.016.402

Rincian estimasi pendapatan dan realisasi PNPB per tanggal pelaporan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Rincian Estimasi pendapatan dan realisasi PNPB Per 31 Desember 2020

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan Jasa	--	-	-
2	Pendapatan Lain-lain	0.	17.016.402	-
	Jumlah	0.	17.016.402	-

Realisasi per 31 Desember 2020 senilai 17.016.402,00. Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2020 dan 2019 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNPB per 31 Desember 2020 mengalami penurunan senilai (74,8%) persen dari realisasi pendapatan per 31 Desember 2019.

Tabel 9. Perbandingan Realisasi pendapatan per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Kenaikan
1	Pendapatan Lain-lain	17.016.402	67.552.801	(74,8)
	Jumlah	17.016.402	67.552.801	(74,8)

Realisasi Belanja
Rp14.539.868.067,00
(netto)

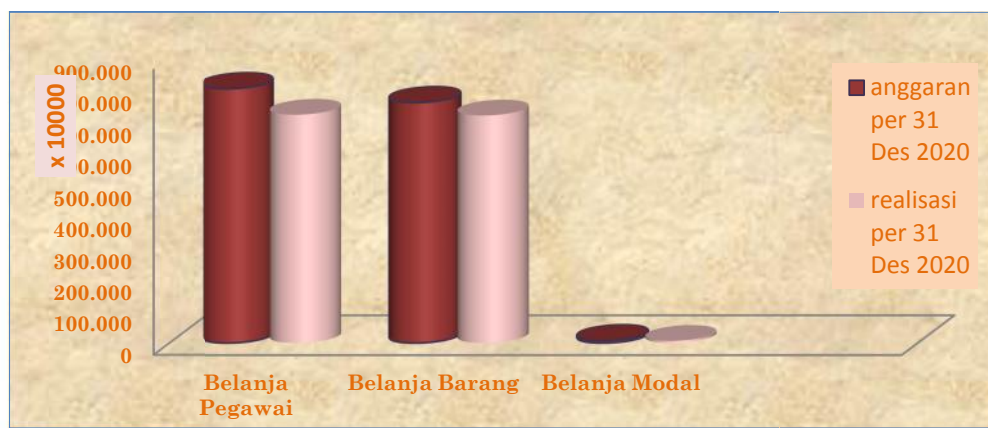
B.2 BELANJA

Balai POM di Pangkalpinang mendapatkan pagu anggaran pada awal TA.2020 senilai **Rp20.831.967.000,00** Setelah revisi penghematan maka pagu TA. 2020 senilai **Rp15.779.716.000,00**. Realisasi sampai 31 Desember 2020 senilai **Rp14.539.868.067,00 / 92,14% (netto)**.

Selisih realisasi belanja negara senilai **Rp15.781.714,00**. yang berupa pengembalian belanja untuk kelebihan pembayaran perjalanan dinas awareness QMS BPOM Integrasi ISO di Jakarta a.n Al Ihya senilai Rp365.493,00. Perjalanan dinas Bimtek aplikasi dashboard penindakan di depok a.n Terry dan Frans senilai Rp2.324.800,00. Perjalanan dinas magang mikrobiologi di P3OMN a.n Septo senilai Rp7.920.000,00. Perjalanan dinas peserta bimtek KKPD di Bangka Tengah a.n Sumiati senilai Rp10.000,00. Perjalanan dinas pengembangan Lab. Kimia a.n Ahmad Burhan senilai Rp753.602,00. Kelebihan Tunjangan Fungsional a.n Riantika senilai Rp2.100.000,00. Kelebihan pembayaran gaji a.n Riantika senilai Rp256.200,00 yang telah disetor ke negara melalui E-Billing SSPB(Surat Setoran Pengembalian Belanja) serta pengembalian belanja berupa pembulatan gaji senilai Rp2.935,00.

Tabel 10. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Des 2020

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
51	Belanja Pegawai	8.074.036.000.	7.249.528.753.	89,79
52	Belanja Barang	7.631.405.000.	7.236.806.528.	94,83
53	Belanja Modal	74.275.000.	69.314.000.	93,32
	Total Belanja Bruto	15.779.716.000.	14.555.649.781.	92,24
	Pengembalian Belanja		15.781.714.	
	Total Belanja Netto	15.779.716.000.	14.539.868.067.	92,14



Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020

Tabel 11. Rincian Belanja Berdasarkan Program 31 Desember 2020

PROGRAM	31-Des-20		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Program Pengawasan Obat dan Makanan	15.779.716.000	14.539.868.067	92,14
Total Belanja	15.779.716.000	14.539.868.067	92,14

Perbandingan Realisasi Belanja (Netto) per 31 Desember 2020 mengalami penurunan senilai (1,6%) dibanding realisasi belanja per 31 Desember 2019.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Belanja pegawai untuk tunjangan kinerja ke-13 dan ke-14 tidak terserap. Serta ada pegawai pindah sehingga penyerapan gaji pokok berkurang.
2. Belanja barang mengalami penurunan karena adanya pandemic covid-19 yang menyebabkan kegiatan-kegiatan tidak berjalan optimal di tahun 2020. Terdapat sisa anggaran untuk perjalanan dinas.
3. Belanja modal sudah 100% pelaksanaan dengan penyerapan senilai 93,32% dari anggaran.

Tabel 12. Perbandingan realisasi belanja per 31 Des 2020 dan 2019

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja per 31 Desember 2020	Realisasi Belanja per 31 Desember 2019	Persen (%)
51	Belanja Pegawai	7.247.169.618.	7.369.918.796.	1,67
52	Belanja Barang	7.223.383.949.	11.484.438.479.	(37,10)
53	Belanja Modal	69.314.500.	3.098.713.300.	(97,76)
	Jumlah	14.539.868.067.	21.953.070.575.	(33,37)

Belanja Pegawai
Rp7.247.169.618,
00(netto)

B.3 BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai Balai POM di Pangkalpinang per 31 Desember 2020 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, Uang makan dan Belanja Lembur.

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2020 senilai **Rp7.247.169.618,00** atau **89,76% (netto)**. Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2019 adalah **Rp7.369.918.796,00** atau **96,11% (netto)**.

Realisasi belanja per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan senilai 1,67 persen dari per 31 Desember 2019. Tidak terdapat kenaikan signifikan karena tunjangan fungsional ke-13 dan 14 tidak cair. Serta ada pegawai yang pindah sehingga gaji pokok tidak terserap maksimal.

Tabel 13. Rincian Realisasi Belanja per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	30-Des-20	30-Des-19	Naik/(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 2.619.373.000	Rp 2.461.265.300	158.107.700	6,42
Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 47.281	Rp 41.729	5.552	13,30
Belanja Tunj.Suami/Istri PNS	Rp 101.347.048	Rp 107.900.458	(6.553.410)	(6,07)
Belanja Tunj.Anak PNS	Rp 26.803.124	Rp 26.447.178	355.946	1,35
Belanja Tunj.Struktural PNS	Rp 52.740.000	Rp 44.640.000	8.100.000	18,15
Belanja Tunj.Fungsional	Rp 200.085.000	Rp 203.750.000	(3.665.000)	(1,80)
Belanja Tunj.PPh	Rp 2.431.919	Rp 2.624.900	(192.981)	(7,35)
Belanja Tunj.Beras PNS	Rp 102.233.700	Rp 102.603.180	(369.480)	(0,36)
Belanja Uang Makan PNS	Rp 493.664.000	Rp 419.606.000	74.058.000	17,65
Belanja Tunj.Umum PNS	Rp 77.560.000	Rp 72.070.000	5.490.000	7,62
Belanja Lembur	Rp 48.556.000	Rp 91.310.000	(42.754.000)	(46,82)
Belanja Tunjangan Kinerja	Rp 3.524.687.681	Rp 3.840.991.042	(316.303.361)	(8,23)
Realisasi Belanja Bruto	Rp 7.249.528.753	Rp 7.373.249.787	192.582.327	(1,68)
Pengembalian Belanja	Rp 2.359.135	Rp 3.330.991	(971.856)	
Realisasi Belanja Netto	Rp 7.247.169.618	Rp 7.369.918.796	Rp 193.554.183	(1,67)

Belanja Barang

Rp7.223.383.949,00.

(netto)

B.4 BELANJA BARANG

Awal tahun 2020 Belanja Barang sebesar Rp10.894.931.000,00. setelah mengalami revisi menjadi Rp7.631.405.000,00 dikarenakan penghematan.

Realisasi belanja barang per 31 Desember 2020 senilai **Rp7.223.383.949,00** atau **94,65%(netto)**.

Rupiah Murni terserap senilai **Rp6.540.940.000,00** atau **94,37% (netto)** dan untuk PNPB terserap **Rp682.443.941,00** atau **97,49% (netto)**.

Per 31 Desember 2019 senilai **11.484.438.479,00** atau **90,91%(netto)**. Terdapat kenaikan senilai 3,46%. Dikarenakan pandemik virus Covid-19 mengakibatkan berkurangnya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai POM di Pangkalpinang dikarenakan revisi anggaran serta pemeriksaan dan KIE juga terbatas.

Tabel 14. Rincian Realisasi Belanja Barang per 31 Des 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi per 31 Des 2020	Realisasi per 31 Des 2019	Naik/Turun %
Belanja Barang Operasional	Rp 1.650.934.368	Rp 1.452.980.809	13,62
Belanja Barang Non Operasional	Rp 1.151.942.857	Rp 1.642.954.626	(29,89)
Belanja Barang Persediaan	Rp 963.825.945	Rp 2.394.535.721	(59,75)
Belanja Jasa	Rp 1.288.308.775	Rp 1.582.343.635	(18,58)
Belanja Pemeliharaan	Rp 890.187.293	Rp 607.065.832	46,64
Belanja Perjalanan	Rp 1.291.607.290	Rp 3.888.759.532	(66,79)
Realisasi belanja Bruto	Rp 7.236.806.528	Rp 11.568.640.155	(37,44)
Pengembalian belanja	Rp 13.422.579	Rp 84.201.676	(84,06)
Realisasi belanja Netto	Rp 7.223.383.949	Rp 11.484.438.479	(37,10)

Balai POM di Pangkalpinang mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemic COVID-19 senilai Rp141.356.000,00. Anggaran tersebut terserap senilai Rp141.223.842,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Anggaran dan Realisasi Akun Covid-19

Kode Output	Kode Komponen	Kode Sub Komponen	Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	Penyerapan (%)	Keterangan		
3165.970	054. Pelayanan Umum/Rumah Tangga dan Pengelolaan Perlengkapan	I. Peningkatan Imunitas Pegawai Balai POM Dalam Rangka Pencegahan Wabah Covid-19	521131	Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19	26.640.000	26.639.018	100,00	Vitamin, Susu UHT		
		J. Pengadaan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Pencegahan Wabah Covid-19	521131	Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19	33.764.000	33.737.622	99,92	Bahan Hand Sanitizer, Botol Sanitizer, Masker, Sarung Tangan, Thermo Gun, Face Shield, Hand Sanitizer		
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Y. Pengadaan Sarana dan Prasarana Loka POM Dalam Rangka Pencegahan Wabah Covid-19	521131	Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19	1.254.000	1.254.000	100,00	Masker		
		Z. Peningkatan Imunitas Pegawai Loka POM Dalam Rangka Pencegahan Wabah Covid-19	521131	Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19	19.998.000	19.993.203	99,98	Vitamin, Susu UHT		
3165.083	Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan	001. Loka		D. Petugas Pengujian Sampel Covid-19	521241	Belanja Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19	30.000.000	30.000.000	100,00	Honor Jasa Tenaga Kesehatan dan Analisis Lab
3165.994	Layanan Perkantoran	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor		B. Rapid Test Kit Bagi Kesehatan Pegawai Dalam Rangka Pencegahan Covid-19	521241	Belanja Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19	29.700.000	29.599.999	99,66	Honor Jasa Tenaga Kesehatan dan Analisis Lab dan Pengadaan Rapid Test
TOTAL					141.356.000	141.223.842	99,91			

Belanja Modal
Rp69.314.500,00
(netto)

B.5 BELANJA MODAL

Realisasi belanja modal per 31 Desember 2020 senilai **Rp69.314.500,00. atau 93,32%**. Realisasi per 31 Desember 2019 senilai **Rp3.098.713.300. atau 99,42%**.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi belanja modal per 31 Desember 2020 telah dilaksanakan 100% dengan penyerapan anggaran senilai 93,32%.

Dikarenakan penghematan maka belanja modal dari anggaran awal senilai Rp1.863.000,00. menjadi Rp74.275.000,00.

Tabel 16. Rincian Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi per 31 Des 2020	Realisasi per 31 Des 2019	Naik/(Turun)	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 69.314.500	Rp 3.098.713.300	Rp (3.029.398.800)	(97,76)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -	Rp -	-
Realisasi Belanja Bruto	Rp 69.314.500	Rp 3.098.713.300	Rp (3.029.398.800)	(97,76)
Pengembalian belanja	Rp -	Rp -	Rp -	-
Realisasi Belanja Netto	Rp 69.314.500	Rp 3.098.713.300	Rp (3.029.398.800)	(97,76)

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp69.314.500,00
(netto)

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing senilai Rp69.314.500,00. dan Rp3.098.713.300,00. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 mengalami penurunan senilai (97,76) persen dibandingkan realisasi 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan penghematan anggaran belanja peralatan dan mesin pada Tahun 2020, akan tetapi pengadaan 2020 telah dilaksanakan 100 %. Pembelian senilai Rp69.314.500,00. terdiri dari:

Tabel 17. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Des 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI 31 Des 2020	REALISASI 31 Des 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.314.500	3.098.713.300	-97,76
Jumlah Belanja Kotor	69.314.500	3.098.713.300	-97,76
Pengembalian	0	0	-
Jumlah Belanja	69.314.500	3.098.713.300	-97,76

- Pengadaan Camera Digital Balai POM di Pangkalpinang sebanyak 1 unit senilai Rp 19.359.000.
- Pengadaan CCTV Loka POM di Belitung sebanyak 1 unit senilai Rp 7.370.000.
- Pengadaan Infrared Thermometer Loka POM di Belitung sebanyak 1 unit senilai 1.380.000.
- Pengadaan A.C Split Balai POM di Pangkalpinang sebanyak 3 unit senilai 13.975.500.
- Pengadaan Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya) Balai POM di Pangkalpinang sebanyak 1 unit senilai Rp 2.420.000,00.
- Pengadaan Laptop sebanyak 2 unit dan Scanner sebanyak 1 unit Balai POM di Pangkalpinang senilai Rp21.801.000,00
- Pengadaan Mic Condensor Loka POM di Belitung sebanyak 1 unit senilai Rp1.033.000,00
- Pengadaan kamera DSLR Balai POM di Pangkalpinang sebanyak 1 unit senilai Rp19.359.000,00
- Pengadaan Alat Komunikasi Pendalaman Informasi Balai POM di Pangkalpinang sebanyak 1 unit senilai Rp1.976.000,00

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Persediaan

Rp2.139.065.246,
00

C.1 PERSEDIAAN

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah senilai Rp 2.139.065.246,00. dan Rp 1.479.487.310,00.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019

Persediaan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Barang Konsumsi	192.553.007	77.309.948
Barang untuk Pemeliharaan	84.000	352.000
Suku Cadang	1.014.045.212	612.313.478
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-
Bahan Baku	-	789.511.884
Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	932.383.027	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	2.139.065.246	1.479.487.310

Terdapat transfer masuk persediaan senilai Rp 81.988.476,00 terdiri dari:

Tabel 19. Transfer Masuk Tahun 2020

No	Tanggal	No BAST	Asal	Kuantitas	Total
1	12/02/2020	PP.03.02.83.835.02.20.0025A	P3OMN	47 Vial	18.751.068
2	19/03/2020	PP.03.02.83.835.03.20.0059A	P3OMN	66 Vial	25.533.203
3	29/06/2020	PP.03.02.83.835.06.20.0150A	P3OMN	11 Vial	5.494.574
4	09/09/2020	PP.03.02.83.835.09.20.207A	P3OMN	81 Vial	28.351.752
5	11/09/2020	PP.03.02.83.835.09.20.209A	P3OMN	1 Vial	47.379
6	23/09/2020	PP.03.02.83.835.09.20.226A	P3OMN	1 Vial	424.300
7	27/10/2020	PP.03.02.83.835.10.20.249A	P3OMN	6 Vial	3.386.200
Jumlah					81.988.476

Terdapat persediaan dalam kondisi usang sejumlah 48 buah dengan nilai total senilai Rp 69.357.115,00 sebagai berikut :

Tabel 20 Persediaan Kondisi usang

KODE	URAIAN	KUANTITAS	RUPIAH
117131	BAHAN BAKU		
1010102001	Bahan Kimia Padat	10	12.898.630
000012	- Natrium Sulfat Anhidrat (1.06649.1000)	1	498.300
000166	- Ec Broth For Microbiology (1.10765.0500)	1	1.295.000
000230	- Plate Count Agar Casein (1.05463.0500)	1	1.057.326
000255	- Asam Pikrat (197378-100g)	1	2.065.000
000264	- Baku Zn (1.70369.0100)	1	3.219.700
000320	- Kalsium Klorida (1.02382.0500)	2	1.786.000

000322	- Natrium Bikarbonat (1.06329.1000)	1	788.700
000421	- Asam Sitrat Anhidrat (1.00243.1000)	1	838.000
000646	- Yeast Extract Granulated (1.03753.0500)	1	1.350.604
1010102002	Bahan Kimia Cair	28	36.817.185
000015	- Ammonium Asetat (1.01116.1000)	1	991.100
000090	- N-Heksan (1.04367.2500)	10	7.866.000
000091	- Asam Klorida (1.00317.2500)	5	2.612.785
000092	- Diethyl Ether For Analysis Emsure (1.00921.5000)	4	3.388.000
000120	- Natrium Hipochloride Cat.(S.1906)	1	1.045.000
000123	- 1-Butanol (1.01990.2500)	1	3.162.500
000131	- Benzene (1.01783.2500)	1	3.670.700
000134	- Egg Yolk Tellurite Emulsion (1.03785.0001)	1	2.497.000
000144	- Karl Fischer Titrant 5 (1.88010.1000)	1	1.905.200
000145	- Xylen (1.08661.2500)	1	1.464.100
000167	- Karl Fischer Solvent (1.88015.2500)	2	8.214.800
1010102999	Bahan Kimia Lainnya	10	19.641.300
000026	- N-Pentane (1.07177.2500)	2	8.993.600
000065	- Natrium Hidrogen Karbonat (1.06329.0500)	2	974.600
000098	- Etil Asetat (1.09623.2500)	5	6.234.500
000102	- Feri Klorida Heksahidrat (1.03943.0250)	1	3.438.600
Jumlah		48	69.357.115

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Utama Badan POM Tanggal 9 Februari 2021 Nomor : PL.03.01.2.25.02.21.39 Perihal Penatausahaan BMN, dimana untuk barang yang dibeli dengan Mata Anggaran Keuangan (MAK) belanja 521211 dan masih terdapat sisa di akhir periode pelaporan, yaitu 31 Desember 2020, maka untuk barang sisa tersebut dilakukan stock Opname dan input di aplikasi Persediaan. Barang - barang tersebut akan digunakan untuk operasional perkantoran selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari:

Tabel 21. Stock Opname Belanja Barang Akun 521211 Per 31 Des 2020

NO	NAMA BARANG	QTY	HARGA	JUMLAH
1	Goodie Bag Canvas GKPD	37	Rp 55.000	Rp 2.035.000
2	Blocknote GKPD,PJAS, KIE	605	Rp 16.500	Rp 9.982.500
3	Ballpoint GKPD,PJAS, KIE	1.487	Rp 5.500	Rp 8.178.500
4	Rompi Kader	16	Rp 220.000	Rp 3.520.000
5	Goodie Bag KIE	750	Rp 33.000	Rp 24.750.000
6	Kipas	390	Rp 14.300	Rp 5.577.000
7	Tempelan Kulkas	270	Rp 15.400	Rp 4.158.000
8	Pouch	251	Rp 26.400	Rp 6.626.400
9	Plakat	10	Rp 600.000	Rp 6.000.000
TOTAL		3.816		Rp 70.827.400

Hal ini disebabkan pengurangan anggaran akibat pandemi covid-19 sehingga beberapa kegiatan terjadi pengurangan target seperti KIE, GKPD, PJAS dan Pasar Aman sedangkan Gimmick sudah dilakukan pengadaan.

Tanah
Rp3.202.708.111,00

C.2 TANAH

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai POM di Pangkalpinang per 31 Desember 2020 dan 2019 senilai **Rp 3.202.708.111,00**. dan **Rp 3.202.708.111,00**.

Dari jumlah/nilai tanah di atas, tidak terdapat jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga tidak ada tanah sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan. Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang pada Aset Tetap tanah.

Tabel 22. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	3.202.708.111
Mutasi tambah :	-
Mutasi kurang :	-
Saldo per 31 Desember 2020	3.202.708.111

Tabel 23. Rincian Tanah per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai	No Sertifikat
1	2.094 m ²	Kompleks Perkantoran Pemprov. Kep. Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Air Itam - Pangkalpinang	3.183.258.000	29.04.02.17.4.0 0002
2	3.432 m ²	Kompleks Perkantoran Pemprov. Kep. Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Air Itam - Pangkalpinang	19.450.111	29.04.02.17.4.0 0003
JUMLAH			3.202.708.111	

Peralatan dan
Mesin Rp
48.160.525.055,0
0

C.3 PERALATAN DAN MESIN

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp 48.160.525.055,00 dan Rp 47.972.143.117,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Peralatan dan Mesin

Saldo per 31 Desember 2019		Rp47.972.143.117
Mutasi tambah :		Rp15.278.901.812
Saldo Awal	Rp169.603.000	
Pembelian	Rp69.314.500	
Reklasifikasi Masuk	Rp12.439.227.190	
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp148.185.272	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp1.053.452.806	
Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi	Rp1.399.119.044	
Mutasi Kurang :		Rp15.090.519.874
Koreksi Pencatatan	Rp1.073.777.171	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp178.396.469	
Reklasifikasi Keluar	Rp12.439.227.190	

Transaksi Normalisasi BMN	Rp1.399.119.044	
Saldo per 31 Desember 2020		Rp48.160.525.055
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020		Rp37.460.698.595
Nilai Buku per 31 Desember 2020		Rp10.699.826.460

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin senilai Rp 15.278.901.812,00 berupa:

- **Saldo Awal**

- Berdasarkan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Nilai/Kualitas Barang Milik Negara yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Pangkalpinang No : PL.03.02.97.971.02.20.0240 tanggal 11 Februari 2020 menerangkan bahwa melakukan pencatatan pemisahan peralatan dan mesin berupa alat laboratorium secara gabungan bersama dengan alat pengolah data, dengan melakukan input transaksi saldo awal pada aplikasi SIMAK BMN senilai Rp 19.603.000,00.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemisahan Aset Gabungan Berupa Peralatan dan Mesin dengan Gedung Bangunan Hasil Sensus BMN Sampai dengan tahun 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Pangkalpinang No : PL.03.10.97.971.12.20.1856 tanggal 18 Desember 2020 menerangkan bahwa melakukan pencatatan pemisahan peralatan dan mesin berupa lemari asam(fumehood), dengan melakukan input transaksi saldo awal pada aplikasi SIMAK BMN senilai Rp 75.000.000 sebanyak 2 unit.

- **Pembelian**

Terdapat transaksi pembelian selama periode Tahunan Tahun 2020 berupa peralatan dan mesin senilai Rp 69.314.500,00. terdiri dari:

- Pengadaan Camera Digital Balai POM di Pangkalpinang sebanyak 1 unit senilai Rp 19.359.000,00.
- Pengadaan CCTV Loka POM di Belitung sebanyak 1 unit senilai Rp 7.370.000.
- Pengadaan Infrared Thermometer Loka POM di Belitung sebanyak 1 unit senilai Rp 1.380.000,00.
- Pengadaan A.C Split Balai POM di Pangkalpinang sebanyak 3 unit senilai Rp 13.975.500,00.
- Pengadaan Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya) Balai POM di Pangkalpinang sebanyak unit senilai Rp 2.420.000,00
- Pengadaan Microphone Loka POM di Belitung Rp 1.033.000,00
- Pengadaan Alat Komunikasi Telephone Lainnya (Handphone) Balai di Pangkalpinang senilai Rp 1.976.000,00

h. Pengadaan Alat Pengolah Data (Notebook dan Scanner) Balai POM di Pangkalpinang senilai Rp 21.801.000,00

- **Reklasifikasi Masuk**

Berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tentang Pemisahan Aset Gabungan Alat Laboratorium Hasil Sensus BMN Sampai Dengan Tahun 2018 sebagai Tindak Lanjut Atas Hasil Inventarisasi (Sensus) BMN Badan POM nomor : PL.03.10.97.971.12.20.1857 Tanggal 18 Desember 2020, dimana masih ditemukan alat laboratorium yang pencatatannya masih gabungan pada Balai POM di Pangkalpinang. Dikarenakan kesulitan menemukan dokumen sumber untuk perincian harga aset gabungan sehingga untuk penginputan nilai BMN dilakukan dengan menggunakan kodefikasi dan tahun perolehan yang sama melalui Reklas Masuk (aset yang akan dipisahkan) senilai Rp 12.439.227.190,00.

- **Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap**

Berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tentang Perubahan Kondisi Barang Milik Negara nomor : PL.03.09.97.971.08.20.836 Tanggal 03 Agustus 2020, sehubungan akan dilakukan usulan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Balai POM di Pangkalpinang dengan kondisi rusak berat dimana pada Tahun 2019 telah dilakukan transaksi penghentian aset Barang Milik Negara tetapi tidak dilakukan transaksi perubahan kondisi rusak berat pada aplikasi SIMAK BMN untuk item barang terlampir dan sesuai koordinasi dengan Bagian Perlengkapan Badan POM maka dilakukan transaksi penggunaan kembali BMN yang dihentikan dan dilakukan perubahan BMN dengan kondisi baik senilai Rp 148.185.272,00.

- **Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas**

Berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tentang Koreksi Perubahan Nilai/Kualitas Barang Milik Negara nomor : PL.03.02.97.971.09.20.1136 tanggal 17 September 2020, menerangkan bahwa dilakukan penggabungan pencatatan aset BMN berupa Detector HPLC ke unit utama HPLC dengan input transaksi koreksi pencatatan nilai/kuantitas senilai Rp 1.053.452.806,00.

- **Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi**

Berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tentang Normalisasi BMN Peralatan dan Mesin Alat Laboratorium nomor : PL.03.10.97.971.12.20.1900 tanggal 28 Desember 2020, menerangkan bahwa dilakukan transaksi normalisasi BMN pada alat Polymerase Chain Reactor

dengan input transaksi perolehan hasil tindak lanjut normalisasi senilai Rp 1.399.119.044,00.

Mutasi transaksi kurang peralatan dan mesin senilai Rp15.090.519.874 berupa:

- **Koreksi Pencatatan**

- a. Berdasarkan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Nilai/Kualitas Barang Milik Negara yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Pangkalpinang No : PL.03.02.97.02.20.240 tanggal 11 Februari 2020 menerangkan bahwa melakukan pencatatan pemisahan peralatan dan mesin berupa alat laboratorium secara gabungan bersama dengan alat pengolah data, dengan melakukan input transaksi koreksi pencatatan nilai/kuantitas senilai Rp 20.324.365,00.
- b. Berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tentang Koreksi Perubahan Nilai/Kualitas Barang Milik Negara nomor : PL.03.02.97.971.09.20.1136 tanggal 17 September 2020, menerangkan bahwa dilakukan penggabungan pencatatan aset BMN berupa Detector HPLC ke unit utama HPLC dengan input transaksi koreksi senilai Rp 1.053.452.806,00.

- **Reklasifikasi dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya**

- a. Berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tentang Perubahan Kondisi Barang Milik Negara nomor : PL.03.09.97.971.07.20.0829 Tanggal 30 Juli 2020, maka diajukan perubahan kondisi menjadi Barang Milik Negara dengan status rusak berat dan dihentikan penggunaannya untuk selanjutnya dilakukan usulan penghapusan BMN senilai Rp 30.671.197,00.
- b. Berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tentang Perubahan Kondisi Barang Milik Negara nomor : PL.03.09.97.971.08.20.836 Tanggal 03 Agustus 2020, sehubungan akan dilakukan usulan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Balai POM di Pangkalpinang dengan kondisi rusak berat dimana pada Tahun 2019 telah dilakukan transaksi penghentian aset Barang Milik Negara tetapi tidak dilakukan transaksi perubahan kondisi rusak berat pada aplikasi SIMAK BMN untuk item barang terlampir dan sesuai koordinasi dengan Bagian Perlengkapan Badan POM maka dilakukan transaksi perubahan kondisi rusak berat BMN dan dilakukan transaksi penghentian BMN dari penggunaan dengan kondisi baik senilai Rp 148.185.272,00.

- **Reklasifikasi Keluar**

Berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tentang Pemisahan Aset Gabungan Alat Laboratorium Hasil Sensus BMN

Sampai Dengan Tahun 2018 sebagai Tindak Lanjut Atas Hasil Inventarisasi (Sensus) BMN Badan POM nomor : PL.03.10.97.971.12.20.1857 Tanggal 18 Desember 2020, dimana masih ditemukan alat laboratorium yang pencatatannya masih gabungan pada Balai POM di Pangkalpinang, maka dilakukan pencatatan pemisahan aset dengan dilakukan transaksi koreksi keluar (aset utama yang akan dipisahkan) senilai Rp 12.439.227.190,00.

• **Transaksi Normalisasi BMN**

Berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tentang Normalisasi BMN Peralatan dan Mesin Alat Laboratorium nomor : PL.03.10.97.971.12.20.1900 tanggal 28 Desember 2020, menerangkan bahwa dilakukan transaksi normalisasi BMN pada alat Polymerase Chain Reactor dengan input transaksi normalisasi BMN senilai Rp 1.399.119.044,00.

Gedung dan Bangunan Rp 7.606.202.750,00

C.4 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp 7.606.202.750,00. dan Rp 7.325.908.750,00. Terdapat mutasi tambah senilai Rp 2.901.722.000,00 (*dua milyar sembilan ratus satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah*), dan mutasi kurang senilai Rp 2.621.428.000 (*dua milyar enam ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah*) berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian kembali dari KPKNL Pangkalpinang sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian nomor : BARIP-250/REV/WKN.04/KNL.04/2020 Tanggal 17 Desember 2020 dan nomor : BARIP-295/REV/WKN.04/KNL.04/2020 Tanggal 17 Desember 2020.

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali nomor: BARIP-295/REV/WKN.04/KNL.04/2020 Tanggal 17 Desember 2020, dimana Barang Milik Negara Bangunan Gedung Laboratorium Permanen NUP 1 tidak ditemukan. Bangunan Gedung Laboratorim Permanen dengan NUP 1, dilakukan penggabungan pada Bangunan Gedung Laboratorium Permanen NUP 2 dikarenakan konstruksi/struktur bangunan menyatu. Berdasarkan pedoman Langkah-Langkah Akhir Tahun 2020 terkait Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara dimana apabila BMN tidak ditemukan dikarenakan penggabungan NUP BMN maka tindak lanjut koreksi melakukan penghapusan atas BMN tidak ditemukan melalui koreksi Pencatatan, dan telah dilakukan transaksi koreksi pencatatan sesuai Surat Keterangan Koreksi Kepala Balai POM di Pangkalpinang nomor : PL.03.10.97.971.12.20.1898 tanggal 28 Desember 2020.

Tabel 25. Rincian Gedung dan Bangunan

Saldo per 31 Desember 2019	7.325.908.750
Mutasi Tambah:	2.901.722.000
Koreksi hasil revaluasi atas BMN yang tidak	518.943.280

ditemukan		
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	382.250.720	
koreksi kesalahan input IP	2.000.528.000	
Mutasi Kurang		2.621.428.000
koreksi pencatatan	2.579.967.000	
koreksi kesalahan input IP	41.461.000	
Saldo per 31 Desember 2020		7.606.202.750
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020		610.912.029
Nilai Buku per 31 Desember 2020		6.995.290.721

Penjelasan transaksi mutasi tambah Gedung dan Bangunan senilai Rp 2.901.722.000,00 berupa:

Berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian kembali dari KPKNL Pangkalpinang sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian nomor : BARIP-250/REV/WKN.04/KNL.04/2020 Tanggal 17 Desember 2020 dan nomor : BARIP-295/REV/WKN.04/KNL.04/2020 Tanggal 17 Desember 2020, telah dilakukan beberapa transaksi koreksi atas Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali yang menyebabkan bertambahnya nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp 2.901.722.000,00.

Penjelasan transaksi mutasi tambah Gedung dan Bangunan senilai Rp 2.621.428.000,00 berupa:

Berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian kembali dari KPKNL Pangkalpinang sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian nomor : BARIP-250/REV/WKN.04/KNL.04/2020 Tanggal 17 Desember 2020 dan nomor : BARIP-295/REV/WKN.04/KNL.04/2020 Tanggal 17 Desember 2020, telah dilakukan beberapa transaksi koreksi atas Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali yang menyebabkan adanya mutasi kurang pada nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp 2.621.428.000,00.

*Jalan Irigrasi dan Jaringan
Rp132.668.710,00*

C.5 JALAN IRIGASI DAN JARINGAN

Saldo Jalan, Irigrasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing senilai Rp 132.668.710,00. dan Rp 194.832.710,00. Berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian kembali, tidak terdapat mutasi tambah dan terdapat mutasi kurang dengan nilai senilai Rp 62.164.000,00 (enam puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Tabel 26. Rincian Jalan, Irigrasi & Jaringan

Saldo per 31 Desember 2019	Rp	194.832.710
Mutasi tambah :	Rp	-
Mutasi Kurang :	Rp	62.164.000
Hasil Rerevaluasi Tahun 2020	Rp	62.164.000
Saldo per 31 Desember 2020	Rp	132.668.710
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	Rp	24.920.570
Nilai Buku per 31 Desember 2020	Rp	107.748.140

Penjelasan transaksi mutasi kurang Jalan, Irigrasi dan Jaringan berupa:

Irigasi

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali nomor: BARIP-250/REV/WKN.04/KNL.04/2020 Tanggal 17 Desember 2020, tidak terdapat mutasi tambah dan terdapat mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp 62.164.000,00 (*enam puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu rupiah*).

Nilai wajar hasil inventarisasi dan penilaian kembali dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 27. Nilai wajar hasil inventarisasi dan penilaian kembali

Irigasi	Saldo Awal	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir
Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	33.472.000	-	21.777.000	11.695.000
Bangunan Hidran Umum	77.122.000	-	40.387.000	36.735.000
Total	110.594.000	-	62.164.000	48.430.000

Aset Tetap Lainnya
Rp46.818.500,00

C.6 ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp 46.818.500,00 dan Rp 46.818.500,00, berupa monografi (Buku).

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per-tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Rincian Aset Tetap Lainnya

Saldo per 31 Desember 2019	46.818.600
Mutasi tambah :	-
Mutasi kurang :	-
Saldo per 31 Desember 2020	46.818.600
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Desember 2020	-
Saldo per 31 Desember 2020	46.818.600

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan Rp (38.096.531.194,00)

C.7 AKUMULASI PENYUSUTAN

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp (38.096.531.194,00) dan Rp (34.534.934.433,00), Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Tabel 29. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	Rp 3.202.708.111	Rp -	Rp 3.202.708.111
2	Peralatan dan Mesin	Rp 48.160.525.055	Rp 37.460.698.595	Rp 10.699.826.460
3	Gedung dan Bangunan	Rp 7.606.202.750	Rp 610.912.029	Rp 6.995.290.721
4	Jalan dan Jembatan	Rp -	Rp -	Rp -
5	Irigasi	Rp 48.430.000	Rp 4.913.881	Rp 43.516.119
6	Jaringan	Rp 84.238.710	Rp 20.006.689	Rp 64.232.021
Akumulasi Penyusutan		Rp 59.102.104.626	Rp 38.096.531.194	Rp 21.005.573.432

Aset Lain-lain
Rp355.469.588,
00

C.8 ASET LAIN-LAIN

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp 355.469.588,00. dan Rp 1.165.109.691,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Mutasi Aset Lain-lain

Saldo per 31 Desember 2019	Rp 1.165.109.691
Mutasi tambah :	Rp 178.396.469
Penghentian aset tetap yang tidak digunakan	Rp 178.396.469
Mutasi Kurang :	Rp 988.036.572
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	Rp 839.851.300
Penggunaan Kembali BMN Yang Sudah Dihentikan	Rp 148.185.272
Saldo per 31 Desember 2020	Rp 355.469.588

Penjelasan Mutasi tambah Aset Lain-lain senilai Rp 178.396.469,00 terdiri dari:
Penghentian Aset Tetap yang tidak digunakan

- Berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tentang Perubahan Kondisi Barang Milik Negara nomor : PL.03.09.97.971.07.20.0829 Tanggal 30 Juli 2020, maka diajukan perubahan kondisi menjadi Barang Milik Negara dengan status rusak berat dan dihentikan penggunaannya untuk selanjutnya dilakukan usulan penghapusan BMN senilai Rp 30.671.197,00.
- Berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tentang Perubahan Kondisi Barang Milik Negara nomor : PL.03.09.97.971.08.20.836 Tanggal 03 Agustus 2020, sehubungan akan dilakukan usulan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Balai POM di Pangkalpinang dengan kondisi rusak berat dimana pada Tahun 2019 telah dilakukan transaksi penghentian aset Barang Milik Negara tetapi tidak dilakukan transaksi perubahan kondisi rusak berat pada aplikasi SIMAK BMN untuk item barang terlampir dan sesuai koordinasi dengan Bagian Perlengkapan Badan POM maka dilakukan transaksi perubahan kondisi rusak berat BMN dan dilakukan transaksi penghentian BMN dari penggunaan dengan kondisi baik senilai Rp 148.185.272,00.

Penjelasan Mutasi kurang Aset Lain-lain senilai Rp 988.036.572,00 terdiri dari:

1. Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola

Berdasarkan Surat Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah/Bangunan BPOM di nomor : PL.03.09.97.971.08.20.857 Tanggal 05 Agustus 2020, mengajukan permohonan persetujuan penghapusan BMN peralatan dan mesin kondisi rusak berat pada Balai POM di Pangkalpinang sejumlah 159 unit dengan harga perolehan Rp 843.544.340 (Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah) kepada Sekretaris Utaman Badan POM.

2. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan

Berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tentang Perubahan Kondisi Barang Milik Negara nomor : PL.03.09.97.971.08.20.836 Tanggal 03 Agustus 2020, sehubungan akan dilakukan usulan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Balai POM di Pangkalpinang dengan kondisi rusak berat dimana pada Tahun 2019 telah dilakukan transaksi penghentian aset Barang Milik Negara tetapi tidak dilakukan transaksi perubahan kondisi rusak berat pada aplikasi SIMAK BMN untuk item barang terlampir dan sesuai koordinasi dengan Bagian Perlengkapan Badan POM maka dilakukan transaksi penggunaan kembali BMN yang dihentikan dan dilakukan perubahan BMN dengan kondisi baik senilai Rp 148.185.272,00.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan/Amor-
tisasi Aset
Lainnya
(Rp355.469.588,00)*

C.9 AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp (355.469.588,00) dan Rp (1.122.336.621,00) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	355.469.588	355.469.588	-
Jumlah	355.469.588	355.469.588	-

Akumulasi penyusutan aset lainnya berasal dari aset tetap yang tidak digunakan senilai Rp 355.469.588,00 berupa peralatan dan mesin yakni Microdigest yang belum dilakukan penghapusan aset.

Utang Kepada Pihak
Ketiga
Rp90.248.239,00

C.10 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Nilai Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing senilai Rp90.248.239,00. dan Rp44.355.786,00.

Utang kepada pihak ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Tabel 32. Uraian Utang kepada pihak ketiga

No.	Uraian	Jumlah
1	Listrik (PLN) des 2020	Rp 34.410.805
2	Telepon (Telkom) des 2020	Rp 1.020.579
3	Internet (speedy) des 2020	Rp 2.491.352
4	Pengiriman surat dinas des 2020	Rp 1.227.650
5	VPN des 2020	Rp 5.500.000
6	Langganan Tabloid des 2020	Rp 48.000
7	Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat bulan Nop-Des 2020 utk 2 pegawai	Rp 776.842
8	Kekurangan Gaji Kenaikan Jabatan Desember 2020 utk 2 pegawai	Rp 1.600.200
9	Gaji Susulan CPNS Desember 2020	Rp 11.150.817
10	Kekurangan Gaji Kenaikan Jabatan Desember 2020 utk 21 pegawai (11 pegawai Balai POM di Pangkalpinang dan 10 pegawai Loka POM Belitung)	Rp 13.700.000
11	Uang Makan Desember 2020 CPNS	Rp 3.439.000
12	Tunjangan Kinerja Desember 2020 CPNS	Rp 14.882.994
Total		90.248.239

Ekuitas
Rp23.101.208.939,0
0

C.11 EKUITAS

Nilai Ekuitas tersaji per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing senilai Rp23.101.208.939,00. dan Rp25.685.381.349,00.

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
Penerimaan Negara
Bukan Pajak
Rp2.565.400,00

D.1 PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah senilai Rp2.565.400,00. dan Rp16.481.084. PNBPN diperoleh dari Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah. Pendapatan tersebut dari Denda Keterlambatan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional Loka Belitung senilai Rp2.100.000,00. Denda Keterlambatan Pengadaan Pendukung Pengujian Balai POM di Pangkalpinang senilai Rp102.400,00 serta Denda Keterlambatan Pengadaan Suku Cadang Balai POM di Pangkalpinang senilai Rp363.000,00

Tabel 33. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	31/12/2020	31/12/2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	2.565.400	16.841.084	(84,77)
Jumlah	2.565.400	16.841.084	(84,77)

Beban Pegawai
Rp7.286.966.919,00

D.2 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai pada Per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing senilai Rp7.286.966.919,00 dan Rp7.373.183.912,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 34. Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-20	31-Des-19	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	3.201.737.244	3.023.670.870	5,89
Beban Uang Makan	497.103.000	419.606.000	18,47
Beban Lembur	48.556.000	88.916.000	(45,39)
Beban Pegawai (tunj khusus/keg)	3.539.570.675	3.840.991.042	(7,85)
Jumlah	7.286.966.919	7.373.183.912	(1,17)

Beban Persediaan
Rp676.481.547,00

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan pada Per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing senilai Rp676.481.547,00. dan Rp1.281.632.447,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 35. Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-20	31-Des-19	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	125.976.319	281.233.125	(55,21)
Beban Persediaan Bahan Baku	550.489.228	1.000.399.322	(44,97)
Beban Persediaan Lainnya	16.000	-	-
Jumlah Beban Persediaan	676.481.547	1.281.632.447	(100,18)

Beban Barang dan
Jasa
Rp4.097.281.152,00

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing senilai Rp4.097.281.152,00 dan Rp4.672.570.371,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36. Rincian Beban Jasa Per 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-20	31-Des-19	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.171.101.181	1.038.593.993	12,76
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	94.982.769	80.959.977	17,32
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	28.991.003	32.976.563	-12,09
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	202.070.000	193.480.000	4,44
Beban Barang Operasional Lainnya	79.335.000	105.180.000	-24,57
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	81.623.843	0	
Beban Bahan	747.604.858	1.052.451.626	-28,97
Beban Honor Output Kegiatan	217.195.000	238.156.000	-8,80
Beban Barang Non Operasional Lainnya	127.543.000	349.953.000	-63,55
Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	59.599.999	0	
Beban Langganan Listrik	470.222.020	456.022.514	3,11
Beban Langganan Telepon	17.902.479	11.849.801	51,08
Beban Sewa	461.130.000	633.401.897	-27,20
Beban Jasa Profesi	215.200.000	257.370.000	-16,38
Beban Jasa Lainnya	122.780.000	222.175.000	-44,74
Jumlah	4.097.281.152	4.672.570.371	-12,31

Balai POM di Pangkalpinang mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemic COVID-19 senilai Rp111.356.000,00. Anggaran tersebut terserap senilai Rp111.223.842,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37. Rincian Beban Akun Covid-19

No	Beban	Jumlah	Ket
1	Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19	81.623.843	Bahan Hand Sanitizer, Botol Sanitizer, Masker, Sarung Tangan, Thermo Gun, Face Shield,

			Hand Sanitizer, Vitamin, Susu
2	Beban Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19	59.599.999	Honor Jasa Tenaga Kesehatan dan Analisis Lab dan Pengadaan Rapid Test

Beban Pemeliharaan
Rp610.885.094,00

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing senilai Rp610.885.094,00 dan Rp1.663.045.812,00

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Tabel 38. Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-20	31-Des-19	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	152.779.460	197.052.300	-22,47
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	331.810.833	388.239.632	-14,53
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	21.773.900	-100,00
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	9.512.900	2.374.950	300,55
Beban Persediaan Suku Cadang	116.781.901	1.053.605.030	-88,92
Jumlah	610.885.094	1.663.045.812	-63,27

Beban Perjalanan Dinas
Rp1.278.184.711,00

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing senilai Rp1.278.184.711,00 dan Rp3.807.011.856,00

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Tabel 39. Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-20	31-Des-19	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	756.543.470	1.750.541.468	-56,78
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	211.910.000	251.160.000	-15,63
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.135.000	130.850.000	-89,20
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	295.596.241	1.674.460.388	-82,35
Jumlah	1.278.184.711	3.807.011.856	-66,43

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp3.138.011.667,00

D.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing senilai Rp3.138.011.667,00 dan Rp4.759.543.833,00

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan

Amortisasi sebagai berikut:

Tabel 40. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-20	31-Des-19	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.923.081.421	4.576.481.739	-36,13
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	202.148.845	168.216.868	20,17
Beban Penyusutan Irigasi	1.403.966	3.217.789	-56,37
Beban Penyusutan Jaringan	2.105.968	2.105.968	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yg Tdk Digunakan dlm Operasional Pemerintah	9.271.467	9.521.469	-2,63
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	3.138.011.667	4.759.543.833	(34,07)

Keg Non Operasional
Rp(8.107.738,00)

D.8 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Defisit dari Keg. Non Operasional per 31 Desember 2020 dan 2019 senilai Rp(8.107.738,00) dan senilai Rp142.412.060,00

Tabel 41. Rincian Surplus dari Keg Non Operasional per 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	31-Des-20	31-Des-19	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	6.999.999	0	0,00
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(33.501.603)	0	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	68.048.581	165.766.861	-58,95
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(49.654.715)	(23.354.801)	112,61
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(8.107.738)	142.412.060	-105,69

- Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar yang diperoleh dari Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya senilai Rp6.999.999,00 di dapat dari proses lelang BMN peralatan dan mesin kondisi rusak berat pada Balai POM di Pangkalpinang sejumlah 159 unit.
- Beban kerugian pelepasan aset senilai Rp33.501.603. Beban kerugian pelepasan aset ini terdiri dari transaksi Beban Kerugian Pelepasan Aset berupa mutasi tambah Beban Kerugian Pelepasan Aset senilai Rp 839.851.300,00 dan mutasi kurang Beban Kerugian Pelepasan Aset senilai Rp 806.349.697,00
- Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp.68.048.581,00 terdiri dari : Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL senilai Rp344.349,00. Belanja Barang TAYL senilai Rp7.106.654,00

Tabel 42. Uraian Pendapatan per 31 Desember 2020

NO.	URAIAN	TGL	AKUN	JUMLAH
1	Kelebihan Perjadiin Patok Banding RB ke BBPOM di Surabaya a.n Tri Astuti dkk (7 org)	18-20 Des 2019	425912	Rp 269.434
2	Kelebihan Perjadiin Pelatihan Auditor Internal ISO 9001:2015 di Yogyakarta a.n Burhan	9-13 Des 2019	425912	Rp 59.249
3	Kelebihan Perjadiin Inventarisasi BMN di Loka Belitung a.n Ade Yan Emerson dan Anita	9-11 Des 2019	425912	Rp 1.151.802

4	Kelebihan Perjadin Pelatihan Eksternal Pengujian di BMD Training dan Cosulting di Bogor a.n Gita	10-13 Des 2019	425912	Rp 840.227
5	Kelebihan Perjadin Bimtek Studi Tiru Pemdak dan RB di BBPOM di Denpasar a.n Frans E.A dkk	19-21 Des 2019	425912	Rp 150.200
6	Kelebihan Perjadin Monev RB di Badan POM a.n Rachmadiniarni dkk (3 org)	18-20 Des 2019	425912	Rp 1.477.905
7	Kelebihan Tunjangan Kinerja bulan Des 2019	-	425912	Rp 2.369.337
8.	Kelebihan uang makan bulan Desember 2019	-	425912	Rp 788.500
9	Pembulatan pembayaran kekurangan gaji TAYL bulan Sept-Nov 2019 sebanyak 3 pegawai 5 Jiwa a.n Prawita dkk	-	425911	Rp 90
10	Pembulatan pembayaran kekurangan gaji TAYL bulan Jan-Nov 2019 sebanyak 1 pegawai 3 Jiwa a.n Welinda Syafri	-	425911	Rp 759
11	Pengembalian kelebihan gaji okt-des 2019 a.n Riantika Kurniati	-	425911	Rp 343.500
Total				Rp 7.451.003

Serta Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode harga perolehan terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai Tahun 2020. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 senilai Rp60.597.578,00.

- Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode harga perolehan terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai Tahun 2020. Beban Penyesuaian Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 senilai Rp45.807.111,00 serta Beban Persediaan Rusak/Usang senilai Rp3.847.604,00 sehingga Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai (Rp49.654.715)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp25.685.381.349,00.*

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 dan 01 Januari 2019 adalah masing-masing senilai Rp25.685.381.349,00. dan Rp26.098.668.324,00.

*Defisit LO
Rp17093.353.428,00*

E.2 DEFISIT LO

Jumlah defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah defisit senilai Rp17.093.353.428,00 dan Rp23.398.095.087,00.

Surplus (defisit) LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Rp2.485.953.669,00*

E.3 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Penilaian aset tetap Non Revaluasi untuk 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing senilai Rp2.485.953.669,00 dan Rp1.674.028,00.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi terdiri dari transaksi koreksi pencatatan nilai dan kualitas berupa:

Mutasi Tambah Senilai Rp 1.230.520.796,00

1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada Peralatan dan Mesin senilai Rp 20.324.365,00
2. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada Saldo Awal Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp 156.743.625,00
3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada Koreksi Pencatatan Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp 1.053.452.806,00

Mutasi Kurang Senilai Rp 1.226.866.624,00

1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada Saldo Awal Peralatan dan Mesin senilai Rp 169.603.000,00
2. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp 3.810.818,00
3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada Koreksi Pencatatan Peralatan dan Mesin senilai Rp 1.053.452.806,00

Tabel 43. Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2020

No	Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
1	Peralatan dan Mesin	2.485.953.669
	Jumlah	2.485.953.669

*Transaksi Antar Entitas
Rp14.604.840.141,00*

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing senilai Rp14.604.840.141,00. dan Rp22.986.482.140,00.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 44. Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2020

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari entitas lain	Rp (17.016.402)
Ditagihkan dari entitas lain	Rp 14.539.868.067
Transfer masuk	Rp 81.988.476
Jumlah	14.604.840.141

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) (Rp17.016.402,00) / Rp14.539.868.067,00

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, DDEL senilai Rp(17.016.402,00) sedangkan DKEL senilai Rp14.539.868.067,00

Transfer Masuk Rp81.988.476,00

E.4.2 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 senilai Rp81.988.476,00. terdiri dari:

Tabel 45. Rincian Transfer Masuk per 31Des 2020

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Persediaan	P3OMN	18.751.068
		P3OMN	25.533.203
		P3OMN	5.494.574
		P3OMN	28.823.431
		P3OMN	3.386.200
	Jumlah		81.988.476

Ekuitas Akhir Rp23.101.208.939,00

E.5 EKUITAS AKHIR

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing senilai Rp23.101.208.939,00. dan Rp25.685.381.349,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.1.1 Pengelola Keuangan

Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada satker Balai POM di Pangkalpinang telah dilakukan penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Hermanto, S.Si, Apt, MPPM
Pejabat Pembuat Komitmen I	: Mohamad Bagir, S.Farm, Apt, M.Sc.
Pejabat Pembuat Komitmen II	: Andhika Achmad Sugiarto, S.Farm, Apt.
Pejabat Pembuat Komitmen III	: Sony Lawrensia, S. Farm, Apt.
Pejabat Penandatangan SPM	: Ade Yan Emerson, S.Kom.
Bendahara Pengeluaran	: Desy Anindyasari, A.Md

F.1.2 Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional satker Balai POM di Pangkalpinang mengalami perubahan per tanggal 3 Maret 2020 yaitu:

Tabel 46. Rekening Bendahara Pengeluaran

No	Nomor Rekening	Nama Bank	Nama Rekening	NPWP
1	810012672842100	Mandiri Cab. Pangkalpinang	BPG 015 Balai POM Pangkalpinang	00119.522.1.304.000

F.1.3 Alat Gelas Kualitatif

Persediaan alat gelas kualitatif merupakan alat gelas yang masih berada di gudang dan/ atau alat gelas yang berada di laboratorim namun belum digunakan sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Alat gelas kualitatif yang telah digunakan pada laboratorium, dilakukan pencatatan manajerial secara manual. Jumlah persediaan alat gelas kualitatif dengan kondisi baik pada Balai POM di Pangkalpinang per 31 Desember 2020 adalah sejumlah 16.240 unit, dengan rincian terlampir.

F.1.4 Peminjaman Alat Laboratorium dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Peminjaman alat laboratorium dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Balai POM di Pangkalpinang pada tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 47. Peminjaman Alat terkait Covid 19

No	Nama Barang (Merk/Type)	Jumlah	NU P	Harga Perolehan	No. & Tgl BAST Peminjaman	SK Persetujuan Pinjam Pakai dari Pengelola barang	No. & BAST Pengembalian
1	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	1	001	167.853.423	Nomor: B-PL.03.03.97.971.04.20.328 Nomor : 440/0004/DINKE S	Nomor: B-PL.03.06.1.2.05.20.157 Nomor: S-16/MK.6/WKN.04/KNL.04/2020	Nomor: B-PL.03.03.97.971.1.10.20.1436 Nomor : 440/2319/DINKES/2020
2	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	1	002	167.853.423	Nomor: B-PL.03.03.97.971.04.20.328 Nomor : 440/0004/DINKE S	Nomor: B-PL.03.06.1.2.05.20.157 Nomor: S-16/MK.6/WKN.04/KNL.04/2020	Nomor: B-PL.03.03.97.971.1.10.20.1436 Nomor : 440/2319/DINKES/2020

F.1.5 Barang Bukti

Bahwa dalam melaksanakan fungsinya Badan POM melakukan proses penyidikan dibidang obat dan makanan (penindakan) mengacu pada KUHAP, dalam hal ini terkait barang bukti disita dari pemilik/penguasa barang untuk selanjutnya digunakan dalam pembuktian sesuai dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014. Barang-barang yang dilakukan penyitaan sebagai barang bukti, merupakan barang yang diduga secara langsung maupun tidak langsung terkait tindakan pidana yang sedang ditangani sehingga akan dapat memberikan petunjuk (menggambarkan) tindak pidana yang terjadi.

Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh PPNS untuk keperluan pemeriksaan dalam

tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di bidang pengadilan.

Barang Bukti yang di dapat Balai POM di Pangkalpinang per 31 Desember 2020 sebesar:

Tabel 48. Uraian barang bukti per 31 Des 2020

Tahap Perkara	OT	Kos
Proses SPDP	-	-
Tahap 1	60 item (577 pcs) (Rp 20.095.000)	-
P-18/P-19	-	-
P-21	4 item (16 pcs) (Rp 480.000)	77 item (796 pcs) (Rp 9.025.000)
Tahap 2	-	-
Sudah Sidang dan Menunggu Putusan	-	-
Sudah Inkrah	-	-
SP3	-	-

F.1.6 Kebijakan Penilaian Kembali BMN

Penilaian Kembali merupakan proses revaluasi sesuai standar akuntansi pemerintah yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian. Pelaksanaan penilaian kembali aset tetap dilaksanakan berdasarkan:

PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;

PMK Nomor 57/PMK.06/2018 tentang perubahan atas PMK Nomor 118/PMK.06/2017 tentang pedoman pelaksanaan penilaian kembali BMN

PMK Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) BMN berupa aset tetap:

- . Tanah
- . Gedung dan bangunan, dan
- . Jalan, irigasi, dan jaringan yang meliputi:

Jalan dan jembatan, dan

Bangunan air

pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodifikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar,

pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.

Sehubungan dengan pemeriksaan BPK RI terhadap pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018, BPK RI merekomendasikan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang untuk memperbaiki data hasil inventarisasi dan tindak lanjut hasil penilaian kembali BMN. Dalam rangka menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut, telah dilakukan perbaikan penilaian kembali terhadap objek yang menjadi temuan pemeriksaan. Hasil Perbaikan Penilaian Kembali BMN per 31 Desember 2020 sebagaimana **Lampiran I**.

Lampiran I

Hasil Perbaikan Penilaian Kembali BMN per 31 Desember 2020

No	LHIP	Nomor Tiket Asal	Tahun	Status IP	Nama Barang	NUP	Keterangan	Nilai Buku	Nilai Wajar Sebelum	Nilai Wajar Setelah
1	LHIP-253/REV/WKN.04/KNL.04/2020	IP-RV-20191228080450711544	2019	BAR IP Selesai	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1	ditemukan	3.183.258.000	3.183.258.000	3.183.258.000
2	LHIP-304/REV/WKN.04/KNL.04/2020	IP-RV-20200929151121962433	2020	BAR IP Selesai	Bangunan gedung laboratorium permanen	1	Tidak ditemukan	2.006.816.280	2.006.816.280	-
3	LHIP-254/REV/WKN.04/KNL.04/2020	IP-RV-20200929172719384348	2020	BAR IP Selesai	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	11	ditemukan	4.971.867.934	5.562.862.000	7.459.765.000

Lampiran II

**Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi,
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020**

*** Beban Amortisasi**

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm.Peny.	Beban Peny.	Akm.Peny.	Tot.Ak.Penyusutan	Nilai Buku
			s.d Periode ini	Periode ini	Periode ini	s.d Periode ini	Per 31 Desember 2020
A	Tanah						
1	Tanah	3.202.708.111	-	-	-	-	3.202.708.111
	Jumlah	3.202.708.111	-	-	-	-	3.202.708.111
B	Peralatan dan Mesin						
1	ALAT BANTU	214.495.000	54.952.500	29.385.000	-	84.337.500	130.157.500
2	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	2.636.090.333	1.358.345.523	240.284.118	-	1.598.629.641	1.037.460.692
3	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	3.526.600	3.526.600	-	-	3.526.600	-
4	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	14.284.467	14.284.467	-	-	14.284.467	-
5	ALAT UKUR	314.096.087	260.302.486	16.344.943	-	276.647.429	37.448.658
6	ALAT PENGOLAHAN	26.320.000	26.320.000	-	-	26.320.000	-
7	ALAT KANTOR	712.835.314	574.031.314	49.399.200	-	623.430.514	89.404.800
8	ALAT RUMAH TANGGA	1.382.725.686	1.039.882.525	97.237.013	- 9.510.143	1.127.609.395	255.116.291
9	ALAT STUDIO	1.053.523.788	534.452.620	129.043.006	102.021.570	765.517.196	288.006.592
10	ALAT KOMUNIKASI	23.943.216	28.168.270	197.600	- 6.201.054	22.164.816	1.778.400
11	PERALATAN PEMANCAR	652.704.126	543.548.959	65.072.187	-	608.621.146	44.082.980
12	ALAT KEDOKTERAN	187.402.386	88.440.825	28.274.732	-	116.715.557	70.686.829
13	UNIT ALAT LABORATORIUM	33.580.785.063	24.513.623.676	1.733.740.227	249.535.225	26.496.899.128	7.083.885.935
14	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	744.587.524	236.421.981	49.639.170	-	286.061.151	458.526.373
15	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	2.872.700	646.836	191.514	-	838.350	2.034.350
16	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	2.030.118.497	1.912.432.759	42.883.183	- 30.974.000	1.924.341.942	105.776.555
17	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	845.681.290	140.946.880	56.378.752	-	197.325.632	648.355.658
18	PERSENJATAAN NON SENJATA API	1.394.222.421	1.415.484.421	-	- 21.262.000	1.394.222.421	-
19	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	1.236.490.919	670.852.337	287.067.434	-	957.919.771	278.571.148
20	KOMPUTER UNIT	847.520.856	509.703.852	74.692.055	128.330.000	712.725.907	134.794.949
21	PERALATAN KOMPUTER	256.298.782	170.297.320	23.251.287	29.011.425	222.560.032	33.738.750
	Jumlah	48.160.525.055	34.096.666.151	2.923.081.421	440.951.023	37.460.698.595	10.699.826.460
C	Gedung dan Bangunan						
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	6.806.121.750	389.281.097	184.375.553	- 24.951.143	548.705.507	6.257.416.243
2	TUGU/TANDA BATAS	800.081.000	23.041.990	17.773.292	21.391.240	62.206.522	737.874.478
	Jumlah	7.606.202.750	412.323.087	202.148.845	- 3.559.903	610.912.029	6.995.290.721
D	IRIGASI						
1	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	48.430.000	8.044.474	1.403.966	- 4.534.559	4.913.881	43.516.119
	Jumlah	48.430.000	8.044.474	1.403.966	- 4.534.559	4.913.881	43.516.119
E	JARINGAN						
1	JARINGAN LISTRIK	84.238.710	17.900.721	2.105.968	-	20.006.689	64.232.021
	Jumlah	84.238.710	17.900.721	2.105.968	-	20.006.689	64.232.021
F	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN						
1	ALAT UKUR	-	92.863.188	-	- 92.863.188	-	-
2	ALAT KANTOR	-	48.534.910	-	- 48.534.910	-	-
3	ALAT RUMAH TANGGA	-	139.995.280	-	- 139.995.280	-	-
4	ALAT STUDIO	-	134.108.109	7.417.914	- 141.526.023	-	-
5	ALAT KOMUNIKASI	-	5.933.054	-	- 5.933.054	-	-
6	PERALATAN PEMANCAR	-	9.705.000	647.000	- 10.352.000	-	-
7	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	238.245.368	956.553	- 239.201.921	-	-
8	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	355.469.588	355.469.588	-	-	355.469.588	-
9	KOMPUTER UNIT	-	52.308.000	-	- 52.308.000	-	-
10	PERALATAN KOMPUTER	-	45.174.124	250.000	- 45.424.124	-	-
	Jumlah	355.469.588	1.122.336.621	9.271.467	- 776.138.500	355.469.588	-
	Total	59.457.574.214	35.657.271.054	3.138.011.667	- 343.281.939	38.452.000.782	21.005.573.432

Lampiran III**BELANJA YANG MASIH HARUS DI BAYAR**

Nama Satuan Kerja : Balai POM di Pangkalpinang
 Jenis Jasa : kekurangan gaji pegawai, LTGA, dll
 Unit Kerja : Badan POM

No	Nama Rekanan	Nilai Terutang	Jangka Waktu	TMT	Jatuh Tempo	Telah dibayar	Blja Yg Msh Hrs Dibayar
1	Listrik (PLN)	34.410.805	1 bulan	1 jan 2021	20 jan 2021	13 jan 2021	34.410.805
2	Telepon (Telkom)	1.020.579	1 bulan	1 jan 2021	20 jan 2021	14 jan 2021	1.020.579
3	Internet (speedy)	2.491.352	1 bulan	1 jan 2021	20 jan 2021	14 jan 2021	2.491.352
4	Pengiriman surat dinas	1.227.650	1 bulan	1 jan 2021	30 jan 2021	20 jan 2021	1.227.650
5	VPN	5.500.000	1 bulan	1 jan 2021	30 jan 2021	27 jan 2021	5.500.000
6	Langganan Tabloid	48.000	1 bulan	1 jan 2021	30 jan 2021	29 jan 2021	48.000
7	Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat bulan Nop-Des 2020 utk 2 pegawai	776.842	1 bulan	1 jan 2021	30 Feb 2021	1 Feb 2021	776.842
8	Kekurangan Gaji Kenaikan Jabatan Desember 2020 utk 2 pegawai	1.600.200	1 bulan	1 jan 2021	30 Feb 2021	1 Feb 2021	1.600.200
9	Gaji Susulan CPNS Desember 2020	11.150.817	1 bulan	1 jan 2021	30 Feb 2021	1 Feb 2021	11.150.817
10	Kekurangan Gaji Kenaikan Jabatan Desember 2020 utk 21 pegawai	13.700.000	1 bulan	1 jan 2021	30 Feb 2021	5 Feb 2021	13.700.000
11	Uang Makan Desember 2020 CPNS	3.439.000	1 bulan	1 jan 2021	30 Feb 2021	1 Feb 2021	3.439.000
12	Tukin Desember 2020 CPNS	14.882.994	1 bulan	1 jan 2021	-	-	14.882.994
	Jumlah	90.248.239					90.248.239